

Menganalisis "Blusukan" sebagai Strategi dan Metode Komunikasi Kampanye Politik

Ahmad Rasyid Ritonga^{1*}, Surya Yudha Regif²

¹Program Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

ahmad4004233022@uinsu.ac.id

*Email Korespondensi: ahmad4004233022@uinsu.ac.id

Abstract

This article explores the phenomenon of "blusukan" as a communication strategy and style in political campaigns in Indonesia. "Blusukan", which literally means 'going inside' or 'diving in', refers to unannounced visits by politicians to specific locations to interact directly with the public. This method has become popular among Indonesian politicians, especially after it was used effectively by Joko Widodo during his Jakarta gubernatorial campaign and later in the presidential election. This research seeks to understand how "blusukan" can influence public perception and support the success of political campaigns. The results show that blusukan is able to enhance the image of politicians as leaders who are populist, transparent, and responsive to the needs of the community. Direct interaction with citizens allows politicians to build emotional closeness and obtain direct input from their constituents. However, the article also reveals some challenges and criticisms of the blusukan method. Some argue that blusukan can be symbolic and not always followed by real substantive actions. In addition, the use of social media to publicize blusukan activities often focuses more on imagery than concrete solutions to problems faced by the community. This article concludes that while blusukan has great potential as an effective political campaign strategy, its success depends largely on the authenticity of the politician's intentions and follow-through. Blusukan conducted sincerely and followed by concrete actions can increase public trust and strengthen political support. Conversely, if it is only used as an image tool, blusukan risks generating skepticism and distrust among voters.

Keywords: Blusukan; Political Communication; Leadership

Abstrak

Dalam artikel ini, fenomena "blusukan" dibahas sebagai strategi dan pendekatan komunikasi dalam kampanye politik di Indonesia. "Blusukan", yang secara harfiah berarti "masuk" atau "menyelam", merujuk pada kunjungan cepat oleh politisi ke lokasi tertentu untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang di sekitar mereka. Metode ini menjadi populer di kalangan politisi Indonesia, terutama setelah digunakan oleh Joko Widodo selama kampanye Gubernur DKI Jakarta dan kemudian dalam pemilihan presiden. Bagaimana "blusukan" dapat mempengaruhi persepsi publik dan mendukung kampanye politik adalah tujuan penelitian ini. Penelitian menunjukkan bahwa blusukan dapat meningkatkan citra politisi sebagai orang yang ramah, jujur, dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Dengan berinteraksi secara langsung dengan warga, politisi dapat menciptakan hubungan emosional dan mendapatkan umpan balik langsung dari konstituen mereka. Tetapi artikel ini juga membahas beberapa masalah dan kritik terhadap metode blusukan. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa blusukan hanya dapat bersifat simbolis dan tidak selalu diikuti dengan tindakan nyata. Selain itu, blusukan yang dipublikasikan di media sosial seringkali berpusat pada pencitraan daripada menyelesaikan masalah sebenarnya yang dihadapi masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun blusukan dapat menjadi strategi kampanye politik yang luar biasa, keberhasilannya sangat bergantung pada niat sebenarnya dari politisi dan tindakan lanjut mereka. Dimungkinkan untuk meningkatkan dukungan politik dan meningkatkan kepercayaan publik jika blusukan dilakukan dengan tulus dan diikuti dengan tindakan nyata. Sebaliknya, blusukan berisiko menimbulkan skeptisisme dan ketidakpercayaan di kalangan pemilih jika hanya digunakan sebagai alat pencitraan.

Kata Kunci: Blusukan; Komunikasi Politik; Kepemimpinan

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dinamika kampanye politik di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Salah satu fenomena menarik yang muncul adalah praktik “blusukan”, sebuah istilah lokal yang berarti kunjungan mendadak ke tempat-tempat tertentu, biasanya untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Fenomena ini semakin dikenal luas setelah diterapkan secara efektif oleh Joko Widodo (Jokowi) selama masa jabatannya sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya sebagai Presiden Indonesia. Blusukan menjadi strategi yang menonjol dalam lanskap politik Indonesia dan memicu diskusi mengenai efektivitas serta dampaknya terhadap persepsi publik dan hasil pemilu.

Blusukan sebagai strategi kampanye politik menawarkan pendekatan yang berbeda dari metode konvensional. Dalam konteks politik Indonesia yang seringkali ditandai dengan kampanye besar-besaran dan seremonial, blusukan memberikan nuansa yang lebih personal dan langsung. Politisi yang melakukan blusukan biasanya mengunjungi pasar tradisional, pemukiman padat, atau fasilitas publik lainnya tanpa pengawalan ketat, sehingga memungkinkan interaksi yang lebih akrab dengan warga. Pendekatan ini dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara politisi dan masyarakat, serta memberikan kesan bahwa politisi tersebut benar-benar peduli dan memahami kebutuhan rakyat.

Keberhasilan blusukan Jokowi menarik perhatian banyak politisi lain yang kemudian mengadopsi metode ini dalam kampanye mereka. Namun, popularitas blusukan juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai autentisitas dan efektivitasnya. Beberapa pihak meragukan apakah blusukan benar-benar dilakukan atas dasar kepedulian tulus atau sekadar strategi pencitraan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa fokus pada kegiatan blusukan bisa mengalihkan perhatian dari penyelesaian masalah yang lebih substansial dan sistemik yang dihadapi masyarakat.

Dalam kajian ini, penting untuk memahami konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi munculnya blusukan sebagai strategi kampanye. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan beragam, menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam lingkungan seperti ini, pendekatan kampanye yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan menciptakan kedekatan emosional dengan pemilih menjadi sangat penting. Blusukan menawarkan cara untuk mencapai hal tersebut, dengan menghadirkan politisi secara langsung di tengah-tengah masyarakat dan memperlihatkan kepedulian mereka terhadap isu-isu lokal.

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial memainkan peran kunci dalam popularitas blusukan. Dokumentasi kegiatan blusukan yang disebarluaskan melalui platform media sosial dapat memperluas jangkauan pesan kampanye dan membangun citra positif secara lebih efektif dan efisien. Namun, hal ini juga membuka ruang bagi manipulasi pencitraan, di mana kegiatan blusukan dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan perhatian media dan simpati publik tanpa disertai dengan komitmen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang blusukan sebagai strategi dan gaya komunikasi dalam kampanye politik. Fokusnya adalah untuk memahami bagaimana blusukan mempengaruhi persepsi publik, apa saja faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan metode ini, serta bagaimana politisi dan tim kampanye memanfaatkan blusukan dalam konteks yang lebih luas. Dengan analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai peran blusukan dalam dinamika politik Indonesia, serta implikasinya terhadap praktik kampanye politik di masa depan.

Memahami blusukan dalam dimensi yang lebih luas juga berarti melihat bagaimana praktik ini mencerminkan hubungan antara politisi dan masyarakat, serta bagaimana strategi komunikasi politik dapat berkembang untuk menjawab kebutuhan dan harapan pemilih yang terus berubah. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan untuk memahami konteks politik saat ini tetapi juga penting untuk merumuskan strategi komunikasi politik yang lebih efektif dan autentik di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan studi pustaka/riset pustaka sebagai metode penelitian kualitatif. Istilah "studi pustaka" juga berarti kajian literatur, tinjauan literatur, kajian teoritis, landasan teori, tinjauan literatur, dan tinjauan teoritis. Penelitian kepustakaan terdiri dari karya tertulis, termasuk temuan penelitian yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian dengan studi literatur tidak perlu turun ke lapangan dan bertemu dengan responden, meskipun itu adalah penelitian. (GA Bowen, 2020) Data yang diperlukan untuk penelitian dapat diperoleh dari dokumen atau sumber pustaka. Penelitian pustaka, atau penelusuran pustaka, adalah proses yang melibatkan memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk mengumpulkan data penelitian. Selain data, penelitian ilmiah juga memerlukan hal lain, seperti rumusan masalah, landasan teori, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Studi literatur sama dengan penelitian lainnya dalam hal sumber dan metode pengumpulan data, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Tentang Blusukan

Menurut Novitasari dan Harsanti (2019), blusukan berarti bertemu secara langsung. Namun, disebut sebagai komedi (Lestari & Johar, 2016). Bahkan Jakarta membahas blusukan itu dengan Jokowi saat Zuckerberg mengunjungi Tanah Abang. Ini adalah pilihan politisi karena dekat dan menghibur pemilih. memberikan "kebanggaan" yang tidak nyata kepada masyarakat dan cukup murah. Tiga disertasi melihat blusukan sebagai komponen politik (Oktavia, 2014; Suntama, 2016; Muttaqin, 2016). terlepas dari satu penelitian (Kokarkin, 2018). Blusukan memiliki banyak subjek penelitian. bahkan dalam hal penentuan awal bulan qamariah (Hamdun, 2014). Sejak Jokowi tinggal di Solo, blusukan menjadi kebiasaan komunikasi politik. Apakah ini terjadi sejak pencalonan walikota atau setelah menjadi walikota, harus ditentukan. Namun, Soeharto dan SBY juga melakukannya untuk kunjungan langsung ke masyarakat. dilabeli dengan istilah "blusukan", yang mengacu pada Jokowi. Ini kemudian diadaptasi di Solok (Hawa, Naryoso, Yulianto, Gono, & Ayun, 2016), Batu (Novitasari & Harsanti, 2019), dan Surabaya (Fachrudin & Yuwono, 2017).

Secara etimologis, istilah "blusukan" berasal dari bahasa Jawa, dari kata dasar "blusuk", yang berarti "pintu masuk," dan "sufiks-an", yang berarti "memasuki suatu tempat untuk mengetahui sesuatu." "Blusukan" adalah istilah yang mengacu pada perilaku keluar masuk atau mengenali kondisi alamiah atau budaya suatu tempat. Seseorang yang melakukan perjalanan ke tempat-tempat di mana ada masalah yang belum terungkap disebut blusukan. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui situasi nyata di lapangan. Raja Surakarta, Raja Paku Buwono V., memulai istilah blusukan. Menurut Gama et al. (2019), blusukan merupakan bagian dari identitas etnis orang Jawa dan merupakan simbol budaya, bahasa, organisasi, dan ideologis yang harus diikuti oleh masyarakat Jawa agar dapat berinteraksi satu sama lain. Para politisi memanfaatkan blusukan sebagai metode kampanye untuk mendapatkan simpati masyarakat.

Secara signifikan, arti blusukan yang dilakukan oleh para politisi selama masa kampanye politik telah berubah dari tujuan blusukan yang digagas oleh Raja Paku Buwono V untuk mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya. Misalnya, blusukan menjelang pemilihan bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendapatkan simpati dari calon pemilih. Melalui kegiatan ini, kandidat dapat berinteraksi dengan masyarakat secara interpersonal, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Profil kandidat dapat dilihat secara langsung melalui komunikasi interpersonal ini. Ini termasuk aspek seperti bentuk tubuh, pakaian, gaya bicara, bahasa yang digunakan, dan karakteristik lainnya.

Salah satu cara untuk berkomunikasi adalah blusukan. Tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi dua arah yang terbuka melalui diskusi yang lebih dekat, atau, dalam istilah Barat, mengelola dengan berjalan-jalan. Perspektif lokal menunjukkan bahwa orang Jawa menganggap blusukan sebagai bagian dari percakapan langsung atau secara pribadi antara kandidat dan pendukungnya. Dibangunnya kedekatan personal ini menghasilkan kedekatan psikologis yang dikenal sebagai "sambung roso" atau "sambung rasa dari hati ke hati." Ini menciptakan ikatan emosi (empati) yang kuat sebagai perwujudan prinsip kebersamaan yang tidak membedakan status atau manunggaling kawula lan Gusti.

Karena adanya prinsip kebersamaan tanpa membedakan status antara komunikator dan komunikan, ikatan emosi yang dibangun melalui blusukan terbukti mampu mendekatkan jarak psikologi. Metode gethok tular atau perkataan lisan adalah cara pesan disampaikan. Mengambil contoh dari model pemasaran ekonomi, word of mouth memiliki keuntungan, yaitu menyebarkan informasi secara luas lebih cepat dan lebih terpercaya. Sebagai dasar untuk membangun platform materi kampanye dan meningkatkan kepercayaan publik, kandidat dapat melakukan kunjungan langsung ke masyarakat atau konstituennya melalui blusukan. Dimungkinkan blusukan dapat digunakan sebagai alternatif kritis terhadap model kepemimpinan dominasi politik saat ini, yang dianggap lambat, birokratis, dan jauh dari rakyat. Politisi biasanya menggunakan media sosial sebagai cara untuk melakukan blusukan digital. Media sosial yang dimaksud adalah Instagram atau Twitter.

Meskipun strategi ini memasukkan budaya Jawa, masyarakat sangat senang dengan model kampanye ini. Dalam prinsip Jawa, dikenal dengan istilah "nguwongke", yang berarti "memanusiakan manusia". Memanfaatkan identitas budaya lokal untuk menarik perhatian masyarakat adalah bagian dari pilihan strategi ini. Dalam konteks politik lokal, mengidentifikasi diri sebagai bagian dari etnis lokal sangat penting agar kandidat dapat diterima oleh masyarakat umum, yang pada gilirannya mengarahkan pilihan masyarakat kepada kandidat. Strategi ini sangat didukung oleh simbol identitas yang identik, seperti pakaian, bahasa, dan perilaku. Ini dilakukan untuk mendorong pemilih untuk mendukung politisi. Sebagai contoh, Gibran melakukan blusukan di tahun 2020, mengenakan baju lurik, pakaian adat daerah, saat berkampanye untuk menarik simpati publik. Pakaian ini adalah representasi nyata dari konsep, nilai, dan standar yang mengatur dan menggerakkan masyarakat dalam budaya tertentu. Dalam komunikasi nonverbal, orang tidak menggunakan kata-kata lisan atau tulisan. Dalam pemilihan kepala daerah, pakaian yang dikenakan juga merupakan kampanye pemasaran yang mudah dilihat dan dianggap membedakannya dari kandidat lainnya.

Blusukan, Pemilihan Kepala Daerah, dan Demokrasi Lokal

Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ideal, format pemilihan kepala daerah langsung memberikan legitimasi yang kuat bagi kandidat pemenang Pilkada. Selain itu, pemilihan langsung dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepala daerah terpilih diakui dan bertanggung jawab kepada rakyat. Selain itu, ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat lokal dan meningkatkan demokratisasi lokal. Dalam kenyataannya, muncul hubungan yang berbanding lurus antara desentralisasi dan demokrasi di tingkat lokal, yang ditandai oleh peningkatan kekuatan lokal, atau lokal bossisme. Studi John T. Sidel menunjukkan bahwa kecenderungan ini terkait dengan perkembangan politik saat yang menunjukkan adanya peran elit lokal sebagai broker politik yang berani yang memiliki kontrol monopoli. Aktor negara formal yang bergabung, membentuk jaringan yang mengakar sampai ke tingkat regional terendah, dan berusaha memonopoli kekuasaannya di tingkat lokal dikenal sebagai bossisme lokal. Menurut Romadhan et al. (2019)

Pada akhirnya, keadaan di atas menghasilkan raja-raja kecil yang menguasai wilayah dengan kekuasaan politik melalui parlemen, partai politik, dan eksekutif dan yudikatif lokal,

serta akses ke sumber ekonomi melalui militer dan kepolisian, serta organisasi militer. Dengan perkembangan politik elektoral, fenomena orang kuat lokal ini semakin berkembang dan menguat. Akibat fenomena ini, pembangunan demokrasi melalui Pilkada hanyalah proses. Demokrasi nasional bergantung pada demokrasi lokal (Ahmad, 2019). Perbaikan demokrasi di tingkat lokal akan mendorong demokrasi di tingkat nasional. Oleh karena itu, masalah seperti sengketa Pilkada, kasus korupsi, dan penggunaan kekuasaan harus segera diselesaikan.

Hasil pemilu 2014 dan 2019, serta beberapa pemilihan kepala daerah, seperti di Kota Solo, menunjukkan bahwa blusukan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap politisi. Umumnya, pemilih dari berbagai kelompok masyarakat melihat blusukan sebagai tanda bahwa politisi benar-benar peduli dengan masalah-masalah lokal. Banyak orang mengapresiasi politisi yang berani turun ke lapangan dan berbicara dengan warga karena menunjukkan keberanian dan keinginan untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Salah satu contoh yang sering disebutkan adalah Jokowi, yang dianggap berhasil menggunakan blusukan untuk menciptakan citra sebagai pemimpin yang merakyat dan responsif. Orang-orang yang ditemui saat blusukan cenderung merasa lebih dihargai dan dihormati, yang menyebabkan mereka mendukung politisi yang relevan.

Salah satu contoh nyata adalah Ridwan Kamil, yang menggunakan blusukan secara luas selama kampanyenya untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil dapat memperkenalkan diri dengan masyarakat umum dan mendengarkan langsung aspirasi warga melalui blusukan yang dia lakukan di berbagai kota dan desa di Jawa Barat. Hal ini meningkatkan popularitasnya dan akhirnya membuatnya menang dalam pemilihan tersebut.

Strategi blusukan yang digunakan oleh pasangan Gibran-Teguh dalam Pilwalkot Solo tahun 2020 merupakan contoh tambahan. Selain dihubungkan dengan inovasi metode blusukan yang digunakan dalam Pilkada yang relatif baru, juga dikaitkan dengan gagasan familisme dan dinasti politik, yang menjadi perhatian berbagai pihak yang berharap pasangan ini menang. Inovasi blusukan yang dimaksud adalah kampanye bertatap muka lewat layar yang dibawa oleh relawan pasangan Gibran-Teguh ke kampung-kampung atau daerah di sekitar Surakarta untuk bertemu langsung dengan anggota komunitas mereka. Metode ini merupakan model kampanye baru yang menggunakan kemajuan teknologi informasi. Ini menggabungkan strategi blusukan, yang dipopulerkan oleh Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka, sebagai strategi lama.

Blusukan yang dilakukan adalah blusukan digital, menggunakan virtual box sebagai sarana kampanye online. Kabinet virtual yang dimaksud terdiri dari layar monitor 49 inci yang dilengkapi dengan kamera circuit TV yang menggunakan jaringan internet dan mikrofon. Tim yang sukses membawa virtual box ini ke rumah-rumah penduduk untuk menyambut mereka dan berinteraksi dengan mereka. Tidak seperti slogan Gibran, "Pemilune slamet, wargane iso ngeliwet" (Pemilunya selamat, warganya bisa makan), warga dapat menyampaikan keluhannya secara langsung pada kesempatan ini tanpa menimbulkan kerumunan. Akibatnya, interaksi dua arah dapat terjadi melalui kotak virtual tersebut.

Dimungkinkan untuk menganggap blusukan sebagai metode komunikasi politik sebagai upaya untuk meningkatkan demokrasi lokal dengan mendekati politisi kepada konstituennya. Demokrasi lokal memungkinkan politisi langsung menjadi bagian dari masyarakat, meningkatkan partisipasi mereka dalam proses politik dan meningkatkan akuntabilitas pemimpin mereka. Politisi dapat mendapatkan masukan langsung dari warga dengan bertemu dengan mereka. Pertemuan langsung juga menunjukkan bahwa mereka terbuka terhadap kritik dan keinginan masyarakat. Namun, blusukan harus lebih dari sekadar simbol atau alat pencitraan untuk benar-benar memperkuat demokrasi lokal. Dibutuhkan komitmen nyata dari politisi untuk menindaklanjuti temuan dan masukan yang diperoleh selama blusukan untuk kebijakan dan program yang nyata. Untuk menjaga kepercayaan publik, juga penting untuk menjadi jujur tentang hasil blusukan dan tindakan yang diambil

Alat Pencitraan vs Alat Partisipasi

Ahmad Rasyid Ritonga

Menganalisis “Blusukan” Sebagai Strategi dan Gaya Komunikasi Dalam Kampanye Politik

Blusukan yang digunakan sebagai alat partisipasi berbeda dengan blusukan yang digunakan sebagai alat pencitraan dalam hal niat dan tindak lanjutnya. Sebagai alat pencitraan, blusukan biasanya berkonsentrasi pada mengumpulkan liputan media dan menciptakan citra yang positif tanpa berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga. Untuk saat ini, blusukan digunakan sebagai alat partisipasi untuk melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa suara mereka diperhatikan dan didengar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politisi yang telah memiliki sejarah menyelesaikan masukan dan temuan warga biasanya melakukan blusukan dengan sukses. Misalnya, Joko "Jokowi" Widodo terkenal bukan hanya karena blusukannya, tetapi juga karena melakukan hal-hal nyata untuk memperbaiki layanan publik dan infrastruktur berdasarkan masukan warga. Kepercayaan meningkat sebagai hasilnya, dan hal ini mendukung demokrasi partisipatif.

Namun demikian, blusukan memiliki beberapa konsekuensi bagi praktik kampanye politik di Indonesia. Pertama, blusukan menunjukkan bahwa politisi harus lebih proaktif dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mendengarkan secara langsung aspirasi mereka. Metode yang lebih intim dan langsung ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan membantu kampanye politik berhasil. Kedua, politisi harus memastikan bahwa tindakan nyata diikuti oleh blusukan. Tidak menanggapi masukan warga dapat merusak reputasi politisi dan menimbulkan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam menyampaikan hasil blusukan serta tindakan yang diambil. Ketiga, blusukan dapat dibantu oleh teknologi informasi dan media sosial. Politisi dapat membangun lebih banyak interaksi dengan masyarakat dan menyebarkan pesan mereka melalui media sosial. Namun, politisi harus berhati-hati agar tidak terlalu berkonsentrasi pada pencitraan dan mengabaikan tujuan sebenarnya dari blusukan.

Blusukan telah mengalami pergeseran makna, yaitu sebagai jenis kampanye dan alat untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Bahkan dalam kampanye, kandidat memberikan janji-janji kepada masyarakat untuk mendukungnya saat blusukan, yang merupakan bagian dari pencitraan politik, menunjukkan kepedulian terhadap masalah masyarakat, mendengarkan keluhan, dan membantu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, blusukan sebagai kekuatan politik adalah lebih dari sekadar pertemuan antara calon politik dan masyarakat; itu juga memiliki unsur-unsur politik sebagai taktik untuk menang dalam pemilihan kepala daerah.

KESIMPULAN

Memanfaatkan blusukan sebagai metode komunikasi dan strategi kampanye politik memiliki potensi besar untuk meningkatkan demokrasi lokal di Indonesia. Blusukan dapat menjadi alat yang berguna untuk membangun kepercayaan dan mendukung akuntabilitas pemimpin lokal dengan mendekati politisi kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses politik. Namun, blusukan sangat bergantung pada komitmen politisi untuk mengambil tindakan berdasarkan temuan dan masukan warga. Menurut artikel ini, blusukan bukan hanya tentang tampil di depan umum, tetapi juga tentang mendengarkan dan bertindak atas keinginan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, blusukan yang tulus dan diikuti oleh kebijakan dan program konkret dapat memperkuat hubungan antara politisi dan masyarakat serta mendukung praktik demokrasi yang lebih partisipatif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. (2019). Political Dynasties and Political Competition in Pakistan
- Asako, Y., Iida, T., Matsubayashi, T., & Ueda, M., 2015. Dynastic politicians: Theory and evidence from Japan. *Japanese Journal of Political Science*, 16(1), pp.5–32.
- Aspinall, E., & Uhaib, M., 2016. Understanding Family Politics: Successes and Failures of Political Dynasties in Regional Indonesia. pp. 1–16.

- Bó, E.D., Cattaneo, M., Tella, R., Di-Foster, A., Galor, O., Hallak, J. C., Knight, B., Levine, D., Mas, A., Moretti, E., Olken, B., Roland, G., & Shepsle, K., 2007. Dal Bó, Dal Bó y Snyder. *Political Dynasties. The Review of Economic Studies*, 76(1), pp.115–142.
- D.A.C.I., 2020. Media Asing Soroti Dinasti Politik Keluarga Jokowi di Pilkada. Cnn. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201204144401-134-578031/media-asing-soroti-dinasti-politikkeluarga-jokowi-di-pilkada>
- D.A.C.I., 2021. Dadang-Sahrul Gunawan Ditetapkan Pemenang Pilkada Bandung. Cnn Indonesia.
- Djati, W.R., 2013. Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. 18, pp. 203–231.
- Hee-Park, T., 2004. The Influences of Familism on Interpersonal Trust of Korean Public Officials. *International Review of Public Administration*, 9(1), pp.121–135.
- Kreuzer, P., 2005. Political Clans and Violence in the Southern Philippines. 71, pp.46.
- Kurtz, D.M., 1989. The Political Family: A Contemporary View. *Sociological Perspectives*, 32(3), pp.331–352.
- Moleong, L.J., 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi rev)*. PT. Remaja Rosdakarya
- Riyansah, A., 2021. Dynasty Control of the Process of Forming a Coalition of Political Parties in the 2020 Cilegon Local Leaders Election. 3(3), pp.244–257.
- Sisca, S.P., 2020. No Title. Kompas.Com, 9 December 2020. <https://www.kompas.com/global/read/2020/12/09/214234870/pilkada-2020-di-mata-media-asing-dinasti-politikjokowi-jadi-sorotan>
- Studi, P., Administrasi, I., Administrasi, F.I., Madura, U., 2015. (PILKADES) Serentak Di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 pp.25–34.
- Surbakti, R., 2015. Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*. <https://kota-surakarta.kpu.go.id/2020/12/18/rapat-pleno-rekapitulasi-penghitungan-suara-tingkat-kota-surakarta-dalam-pilwalkot-surakarta-tahun-2020/> <https://www.kompas.com/global/read/2020/12/09/214234870/pilkada-2020-di-mata-media-asing-dinasti-politik-jokowi-jadi-sorotan?page=all#page2>